

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Desa Wisata

a. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan sekelompok swadaya dan prakarsa masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pariwisata, menyesuaikan peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialnya.¹ Inskeep mendefinisikan desa wisata sebagai sejumlah kecil pengunjung yang bertempat tinggal di lingkungan tradisional, biasanya di desa terpencil, dan belajar tentang kehidupan desa dan lingkungan setempat. Definisi tersebut menjelaskan bahwa desa wisata adalah suatu tempat yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai penting bagi wisatawan yang tertarik dengan kehidupan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan warga desa yang sulit ditemukan di kawasan perkotaan menjadi daya tarik desa wisata.²

Sementara itu, sebagaimana dikutip oleh Wahyuni bahwa Inti Rakyat *Tourism* (PIR) menggambarkan desa wisata sebagai kawasan pedesaan yang memberikan suasana menyeluruh yang mencerminkan keaslian desa dari segi sosial ekonomi, budaya, adat istiadat, kebiasaan, bangunan dan struktur tata ruang atau kegiatan ekonomi desa yang khas atau unik dan menarik serta berpotensi mengembangkan berbagai komponen pariwisata, misalnya atraksi, akomodasi, makanan dan minuman serta kebutuhan pariwisata lainnya.

Nuryanti menggambarkan desa wisata sebagai perpaduan antara tata cara dan tradisi yang tepat dengan unsur kehidupan masyarakat. Desa wisata mempunyai dua komponen utama, yaitu akomodasi, yaitu bagian dari rumah penduduk setempat dan/atau unit yang dikembangkan oleh penduduk setempat; dan atraksi,

¹ Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata* (Sukoharjo: Graha Printama Selaras, 2018), 48.

² I Putu Gede, *Mengelola Desa Wisata* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 26.

yang mencakup kegiatan sehari-hari penduduk setempat dan ruang fisik desa. Komponen-komponen ini memungkinkan pengunjung menjadi bagian dari penduduk desa dan merasakan kehidupan sehari-hari penduduk setempat sekaligus merasakan kehadiran fisik desa sebagai bagian dari kelompok aktif.³

Menurut Subagyo, apabila dilihat dari perspektif kehidupan masyarakat, pariwisata pedesaan atau desa wisata merupakan suatu bentuk pariwisata di mana terdapat objek dan daya tarik kehidupan desa yang memiliki ciri khas masyarakat, panorama alam dan budaya, sehingga memanfaatkan peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Kehidupan pedesaan sebagai daerah tujuan wisata berarti bahwa desa merupakan objek dan subjek pariwisata atau lebih tepatnya sebagai penyelenggara berbagai kegiatan pariwisata yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kelangsungan kegiatan pedesaan sangat dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat.⁴

Berdasarkan beberapa definisi desa wisata yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas, peneliti menarik kesimpulan mengenai pengertian desa wisata. Destinasi wisata yang menampilkan nilai-nilai asli pedesaan didefinisikan sebagai desa wisata. Desa wisata adalah komunitas pedesaan yang berdiri sendiri dan memanfaatkan potensinya dengan memadukan berbagai elemen pariwisata untuk menarik pengunjung.

Perkembangan pariwisata di Tanah Air sangat penting bagi keberadaan desa wisata. Pariwisata tidak lagi selalu terjebak dalam tren perkembangan pariwisata massal, karena desa wisata kini dapat menghadirkan keragaman destinasi yang lebih dinamis ke dalam suatu kawasan wisata. Melalui desa wisata, pariwisata telah terbukti keselarasannya dengan semangat pariwisata

³ Dinar Wahyuni, "Strategi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul," *Aspirasi* Vol. 09, no. 1 (2018): 88.

⁴ Made Antara Dan I Nyoman Sukma Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal* (Bali: Pustaka Larasan, 2015), 13.

sebagai penyerapan tenaga kerja pedesaan, penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, dan alat pengentasan kemiskinan (*pro job, pro growth, pro poor*).⁵

b. Tujuan dan Fungsi Desa Wisata

Menurut Riant Nugroho, mengatakan bahwa dalam pembentukan desa wisata memiliki beberapa tujuan khusus antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung program pemerintah dalam pengembangan pariwisata dengan menyediakan obyek wisata alternatif.
2. Menggali potensi desa untuk pengembangan masyarakat di sekitar desa wisata.
3. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sehingga akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di desa.
4. Mendorong penduduk kota yang mampu secara ekonomi untuk senang mengunjungi desa untuk bersantai (ruralisasi).
5. Mendorong penduduk desa untuk merasa bangga dengan komunitasnya untuk memperlambat proses urbanisasi.
6. Mempercepat asimilasi antara masyarakat non-adat dengan masyarakat adat.
7. Memperkokoh persatuan bangsa agar perpecahan (disintegrasi) dapat diatasi.⁶

Istiyani berpendapat bahwa desa wisata memiliki dua tujuan yaitu untuk meningkatkan signifikansi dan keterlibatan pemerintah daerah dalam bidang pengembangan pariwisata, dan untuk menumbuhkan sinergi dan kemitraan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pariwisata di daerah tersebut bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan ini dicapai dengan mengedepankan dukungan dan sikap positif masyarakat sebagai tuan rumah serta berpegang

⁵ Antara Dan Arida, Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal, 7.

⁶ Riant Nugroho Dan Firre An Suprpto, Membangun Desa Wisata Bagian 2: Strategi Desa Wisata (Jakarta: PT Telex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2021), 20.

teguh pada nilai-nilai Sapta Pesona yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan pariwisata di daerah, serta manfaat selanjutnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa wisata bertujuan untuk memperkenalkan, menjaga, dan memanfaatkan potensi destinasi wisata lokal.

Tujuan desa wisata itu sendiri adalah sebagai media bagi masyarakat lokal untuk menggali potensi wisata dan menumbuhkan sapta pesona di sekitar destinasi, sekaligus sebagai upaya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah (kabupaten/kota) dalam mengembangkan dan memajukan pariwisata daerah.⁷

c. Manfaat Desa Wisata

Menurut Soemarmo, pembentukan desa wisata membawa beberapa manfaat di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi, membangun perekonomian masyarakat di tingkat nasional, regional, dan lokal agar semakin berkembang dan sejahtera.
2. Bidang Sosial, menjadi jalan bagi masyarakat pedesaan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan mata pencaharian yang lebih baik.
3. Bidang Politik, berperan sebagai jembatan perdamaian internasional antar bangsa dunia, serta memperkuat persatuan nasional dan mengatasi perbedaan yang ada.
4. Bidang Pendidikan, menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pola pikir warga desa, serta mendidik mereka untuk hidup bersih dan sehat.
5. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), meningkatkan pengetahuan dan teknologi di bidang pariwisata agar semakin maju dan berkembang.
6. Bidang Sosial Budaya, menjadi wadah untuk mempelajari dan mengembangkan seni dan budaya masyarakat adat yang hampir punah, sehingga dapat dilestarikan dan diwariskan ke generasi selanjutnya.

⁷ Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata: Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata* (Yogyakarta: CV Hijaz Pustaka Mandiri, 2019), 16.

7. Bidang Lingkungan, membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup bagi kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan datang.⁸
- d. Kriteria Desa Wisata

Antara dan Arida mengungkapkan bahwa diperlukan beberapa kriteria tertentu agar suatu desa dapat digolongkan menjadi desa wisata, yaitu:

1. Atraksi wisata, yaitu segala sesuatu yang meliputi alam, budaya, dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling indah dan menarik di desa.
2. Jarak Tempuh, meliputi jarak tempuh dari kawasan wisata khususnya tempat tinggal wisatawan serta jarak tempuh dari ibukota provinsi dan ibukota kabupaten.
3. Luas Desa, menyangkut daya dukung wisata pada suatu desa dengan mempertimbangkan luas wilayah desa, jumlah rumah, dan jumlah penduduk
4. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan, mengingat adanya aturan-aturan khusus bagi masyarakat desa, perlu memperhatikan agama dan sistem kemasyarakatan yang ada karena merupakan aspek penting.
5. Ketersediaan Infrastruktur, seperti sarana dan layanan transportasi, listrik, air bersih, drainase, jaringan telepon, dan sebagainya.⁹

Selanjutnya, menurut Priasukmana dan Mulyadin menyatakan bahwa suatu desa harus memenuhi kriteria-kriteria berikut sebagai syarat menjadi desa wisata:

1. Aksesibilitas baik, memudahkan wisatawan yang berkunjung dengan menggunakan berbagai jenis transportasi. Hal ini akan membantu mempercepat peningkatan jumlah pengunjung.

⁸ Anityas Dian Susanti, "Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang," *Modul 15*, No. 1 (2015): 51, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul/article/view/10735>.

⁹ Antara Dan Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal*, 27.

2. Memiliki objek menarik yang menjadi daya tarik objek wisata seperti seni alami, budaya, legenda, makanan lokal, dan lainnya.
 3. Desa wisata dan wisatawan yang datang mendapatkan penerimaan dan dukungan yang tinggi dari masyarakat dan aparat desa.
 4. Keamanan desa terjamin.
 5. Ketersediaan akomodasi, telekomunikasi dan sumber daya manusia memadai.
 6. Cuacanya sejuk atau dingin.
 7. Menjalinkan komunikasi dengan objek wisata terkenal lainnya.¹⁰
- e. Tipe Desa Wisata

Berdasarkan pola, proses, dan tipe/jenis pengelola desa wisata di Indonesia, tipe desa wisata terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Tipe Terstruktur (*Enclave*)

Tipe *enclave* ini mempunyai dua ciri utama yakni wilayah terbatas dan jauh dari pemukiman warga, meskipun masih dalam wilayah yang sama. Pengembangan tipe ini lebih menekankan pada citra dan infrastruktur didalamnya. Jika daerah tersebut memiliki fasilitas yang lengkap dan terorganisir tentu akan menambah jumlah kunjungan para wisatawan. Perubahan sosial baik adat maupun budaya dalam desa yang dilakukan sejak dini sehingga tidak berdampak negatif bagi kelestarian adat atau budaya desa menjadi nilai tambah dari tipe terstruktur ini. Dengan adanya pembangunan dan pengembangan ini diharapkan dapat menjadi promosi yang baik.

Berikut beberapa kelebihan tipe terstruktur:

- a) Lahan terbatas dilengkapi dengan infrastruktur untuk kawasan yang spesifik. Tipe ini memiliki keuntungan karena dapat menembus pasar internasional dengan citra yang ditanamkan.

¹⁰ Erika Revida, Dkk., Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi, Dan Dampak Kunjungan Wisata (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 5, [https://www.researchgate.net/publication/362707105 Inovasi Desa Wisata Potensi Strategi dan Dampak Kunjungan Wisata](https://www.researchgate.net/publication/362707105_Inovasi_Desa_Wisata_Potensi_Strategi_dan_Dampak_Kunjungan_Wisata).

- b) Adat istiadat dan kebiasaan yang tidak bisa dicampuri oleh dunia luar dapat terus terjaga dan bertahan.
 - c) Tidak terlalu luasnya lahan membuat kualitas komunikasi dan kerjasama team / masyarakat akan solid dan lebih terstruktur.
 - d) Lebih banyak dilirik investor untuk menginvestasikan dananya dalam membantu mengembangkan potensi wisata, karena luas wilayah yang tidak terlalu luas membuat investor lebih mudah dalam mengkordinasi pengembangan.
- 2) Tipe Terbuka (*Spontaneous*)

Tipe terbuka atau *spontaneous* ini memiliki wilayah yang tak terbatas, yang dapat terhubung dengan wilayah lainnya. Desa wisata tipe ini lebih mengunggulkan pembangunan infrastruktur penghubung seperti kualitas jalan, transportasi, lahan parkir, kelancaran air bersih, pembuangan limbah, kebersihan lingkungan dan lain-lain karena letak wisatanya yang banyak dan bahkan terpisah-pisah. Selain itu, tipe ini memiliki lokasi wisata yang dekat dengan pemukiman warga, bahkan menyatu dengan kegiatan warga dalam kesehariannya. Namun, wilayah ini rentan terhadap pengaruh budaya baru.

Adapun beberapa kelebihan desa wisata tipe terbuka :

- a) Wilayah yang luas menjadi nilai lebih dalam menarik minat pengunjung karena wisata yang ditawarkan lebih banyak dan beragam.
- b) Pola hidup, adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat bisa dijadikan nilai tambah untuk daya tarik wisatawan yang berkunjung. Atau bisa juga dijadikan ciri khas wisata tersebut.
- c) Warga berpartisipasi langsung dengan Desa Wisatanya karena pengunjung dapat melihat dan mempelajari budaya wilayah secara menyatu dengan warga.

- d) Tidak hanya menawarkan seputar wisata alam saja, melainkan bisa juga menawarkan keunggulan lainnya.¹¹

f. Klasifikasi Desa Wisata

Berdasarkan indikator desa wisata, desa wisata dapat di kelompokkan menjadi empat yaitu desa rintisan, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri dengan indikator sebagai Berikut:

- a) Desa rintisan dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata.
 - 2) Belum banyak pengembangan sarana dan prasarana.
 - 3) Pengunjung yang berdatangan dari masyarakat sekitar masih belum ada atau sedikit sekali.
 - 4) Belum meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata.
 - 5) Pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta) sangat dibutuhkan
- b) Desa berkembang dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Masyarakat sekitar maupun pengunjung luar daerah mulai mengetahui dan berkunjung.
 - 2) Seiring berkembangnya fasilitas pariwisata pengembangan sarana dan prasarana juga mengalami kemajuan.
 - 3) Masyarakat mulai melihat peningkatan lapangan kerja dan aktivitas perekonomian.
 - 4) Masih diperlukannya pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta), meskipun kesadaran Masyarakat telah mengalami peningkatan.
- c) Desa maju dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Masyarakat sadar betul akan potensi pariwisata, termasuk pertumbuhannya.
 - 2) Banyak orang yang berkunjung, termasuk wisatawan mancanegara karena telah menjadi destinasi wisata populer.

¹¹ Artika Dwi Istiyani, Menggali Potensi Desa Wisata: Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata, 13-15.

- 3) Memadainya sarana prasarana dan fasilitas pariwisata.
 - 4) Melalui pokdarwis/kelompok kerja lokal masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola usaha pariwisata.
 - 5) Melalui dana desa masyarakat memanfaatkan untuk pengembangan desa wisata.
- d) Desa mandiri dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Destinasi desa wisata sudah menyadari sepenuhnya pariwisata dan Sapta Pesona.
 - 2) Pematangan produk wisata melalui paket maupun event serta kunjungan rutin wisatawan lokal dan mancanegara.
 - 3) Masyarakat bersifat otonom dan dapat secara mandiri menjalankan usaha pariwisata secara mandiri dengan memperhatikan sumber daya manusia, produk, organisasi, dan faktor lainnya.¹²

2. Strategi Pengembangan Desa Wisata

a. Pendekatan Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan potensi desa wisata agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan perlu kehati-hatian dalam mengembangkannya. Dalam Antara & Arida, Baiquni mencantumkan lima faktor dan cara yang harus diperhatikan dalam mengembangkan desa wisata:

1) *Holistic Approach*

Pendekatan ini memandang secara holistik atau keseluruhan dari keadaan pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengatur perumusan dan penyelesaian masalah dengan mengintegrasikan berbagai sektor atau komponen pembangunan secara sistematis. *System thinking* adalah metode yang digunakan untuk mendorong inovasi dan pemahaman terbuka dalam penciptaan kebijakan dan konteks pengembangan yang sesuai.

2) *Participatory Learning*

Pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan lokal memerlukan pembelajaran

¹² I Putu Gede, *Mengelola Desa Wisata*, 42.

kolaboratif yang menekankan pada pengkajian dan eksplorasi kebutuhan bersama, dengan bantuan yang diberikan secara partisipatif. Dibandingkan dengan konsultan atau kontraktor pembangunan dari luar yang memiliki kepentingan pribadi, pihak yang paling sadar akan persoalan ini adalah masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pelaku lokal. Konsultan pada penguatan proses berperan untuk memfasilitasi pembelajaran kolektif dan memungkinkan pembelajaran kelompok untuk lebih memahami permasalahan dan solusi tentang tata manajemen masing-masing lembaga. *Workshop*, seminar dan *learning by doing* adalah metode pembelajaran kolaboratif yang digunakan.

3) *Empowerment of Management*

Proses pembelajaran partisipatif atau Triple A (Asih, Asah, dan Asuh) sebagaimana disebut Ki Hajar Dewantoro, mencakup pembelajaran individual dan institusional. Hasil dari proses pembelajaran antara lain pencerahan (*enlightment*) dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*). Para pelaku yang termotivasi untuk belajar dan bekerja merupakan indikator kelembagaan yang kuat. Pengembangan desa wisata akan ditingkatkan dengan pengelolaan kelembagaan yang terus menginspirasi dan memberdayakan masyarakat.

4) *Action Research*

Penelitian tindakan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan. *Action research* ini dapat diaplikasikan melalui pendekatan pembelajaran yang dapat ditingkatkan melalui pengalaman di lapangan.

5) *Sinergy And Network*

Kesediaan untuk menciptakan dan beroperasi dalam jaringan yang melibatkan seluruh komponen kelembagaan, seperti organisasi masyarakat dan bisnis, legislatif, eksekutif dan yudikatif, merupakan pendekatan penting lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan. Sinergi dan networking merupakan upaya memahami karya dan mengatasi

permasalahan pembangunan secara bersama-sama, menciptakan keseimbangan *checks and balances*, dan membangun kepercayaan antar pelaku pembangunan desa wisata.¹³

b. Strategi Pengembangan Desa Wisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekrif 2020–2024 mencantumkan pengembangan desa wisata sebagai bagian dari visinya: “Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia maju, berdaya saing, mengedepankan kearifan lokal dan berkelanjutan dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan memiliki kepribadian berdasarkan gotong royong.” Dari perspektif tersebut, “mengutamakan kearifan lokal” merupakan sudut pandang yang menjadi ciri berkembangnya desa wisata. Oleh karena itu, dengan terciptanya desa wisata diharapkan kearifan lokal bisa ditanamkan pada setiap desa sehingga menjadi daya tarik bagi pengunjung.

Menurut Pearce menyatakan pengembangan desa wisata sebagai suatu prosedur yang mengutamakan metode perbaikan atau pengembangan desa wisata. Secara khusus, pengembangan desa wisata digambarkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan efisiensi pariwisata. Putra menyatakan, pengembangan desa wisata merupakan proses transformasi suatu tempat (desa) yang dapat memanfaatkan aspek-aspek masyarakat desa yang dijadikan ciri khas produk wisata menjadi serangkaian kegiatan pariwisata yang bertema dan terpadu.¹⁴

Sementara itu, Soemarno mengungkapkan bahwa ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai strategi dalam pengembangan desa wisata, sebagai berikut:

¹³ Istijabatul Aliyah, Galing Yudana, dan Rara Sugiarti, *Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 24, <https://puspari.lppm.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/FullBook-Desa-Wisata-2.pdf>.

¹⁴ Aliyah, Yudana, dan Sugiarti, *Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik*, 20.

- 1) Pengembangan sumber daya manusia, dilakukan melalui diskusi, pelatihan, dan kegiatan yang terkait pariwisata lainnya.
- 2) Kolaborasi/kemitraan. Kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari pengaturan kemitraan atau upaya kerja sama antara pengelola desa wisata dan pengusaha pariwisata di kabupaten/kota serta para pembina desa wisata.
- 3) Kegiatan Pemerintahan di Desa Wisata. Di desa wisata kegiatan pemerintah desa yang diadakan, meliputi; pameran pembangunan, rapat dinas, dan perayaan hari-hari besar.
- 4) Promosi Desa Wisata. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung desa wisata perlu secara aktif mempromosikan diri melalui berbagai media.
- 5) Festival/Pertandingan. Untuk menarik wisatawan atau penduduk lokal lainnya, desa wisata harus secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan alam. Menyelenggarakan festival seni, berbagai kompetisi, dan kegiatan lainnya beberapa cara yang bisa dilakukan.
- 6) Membina Organisasi Masyarakat. Ketika lebaran Idul Fitri banyak warga desa yang sering bermigrasi dan kembali ke desa kelahirannya atau mudik. Dengan demikian mereka dapat dikembangkan dan diorganisir untuk meningkatkan desa wisatanya.
- 7) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas. Perguruan Tinggi di Indonesia masih mensyaratkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL). Oleh karena itu, penting bagi pihak desa wisata dan Perguruan Tinggi yang ada untuk berinteraksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan desa wisata dengan memberikan masukan dan peluang terhadap aktivitas di desa wisata tersebut.¹⁵

¹⁵ Erika Revida, Dkk., Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi, dan Dampak Kunjungan Wisata, 66.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan, yang juga dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat, telah dikenal sejak lama. Sehubungan dengan angka kemiskinan yang terus meningkat di Indonesia, yang berdampak pada masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah, organisasi sosial/masyarakat, dan organisasi profesi telah mencanangkan beberapa program pemberdayaan masyarakat, namun tidak semuanya efektif.

Pemberdayaan atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan "*empowerment*", berasal dari kata "*power*" yang berarti daya/kekuatan. Maka dapat dijelaskan bahwa *empowerment* berarti pemberian daya pada kelompok lemah yang belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah bertugas memberikan kekuasaan atau wewenang kepada mereka yang kurang beruntung, fakir miskin, atau tidak berdaya; Namun, untuk mencapai hal ini, dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan, terutama masyarakat, yang merupakan sasaran dan terlibat dalam seluruh proses pemberdayaan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato, proses pemberdayaan terdiri dari sejumlah langkah yang dimaksudkan untuk memaksimalkan dan memperkuat pemberdayaan (dalam hal kemampuan dan keuntungan kompetitif) kelompok marginal dalam masyarakat, seperti mereka yang berjuang melawan kemiskinan. Pemberdayaan sebagai suatu proses mengacu pada kemampuan untuk berpartisipasi, menerima peluang dan mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat secara umum). Melalui pemahaman ini, pemberdayaan dapat diartikan

sebagai suatu proses terencana untuk meningkatkan kegunaan/nilai unggul dari objek yang diberdayakan.¹⁶

Menurut sudut pandang Pearse dan Stiefel menyatakan bahwa pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu primer dan sekunder. Proses pemberdayaan menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sejumlah kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan individu, hal tersebut merupakan arti dari kecenderungan primer. Di sisi lain, kecenderungan sekunder mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses memampukan, mendukung, atau menginspirasi masyarakat agar memiliki kapasitas atau wewenang untuk mengambil keputusan.¹⁷

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan/kegiatan sosial di mana penghuni komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memenuhi kebutuhan sosial atau memecahkan masalah sosial sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.¹⁸

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menganut nilai-nilai sosial. Konsep ini merupakan paradigma pembangunan baru yang berpusat pada "*people-centered*", *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Konsep *empowerment* lebih luas daripada hanya upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau hanya mekanisme untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut (*safety net*).¹⁹

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadikan masyarakat mampu bertahan hidup (*survive*), dan berkembang dan maju dalam arti yang dinamis. Dari sudut pandang politik di tingkat nasional,

¹⁶ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, De La Macca*, vol. 1 (Makassar, 2018), 9.

¹⁷ Nazaruddin Margolang, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Argo Riau* 2, no. 4 (2018): 3.

¹⁸ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 10.

¹⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 25.

ketahanan nasional bersumber dari penguatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat.²⁰

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya ditujukan kepada kelompok maupun individu sebagai sarana mewujudkan kehidupan manusia. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu komponen upaya pengembangan kehidupan bermasyarakat pada tingkat individu, keluarga, dan bangsa/nasional sebagai perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka orang atau masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur normatif. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat membutuhkan adanya pengenalan terhadap hakikat manusia dan meningkatkan visi penerapan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat.

Menurut Suharto, pemberdayaan adalah kapasitas masyarakat, terutama Masyarakat lemah dan rentan, untuk memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), tidak hanya mencakup kebebasan menyatakan pendapat tetapi juga bebas dari rasa sakit, kelaparan, dan kebodohan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berkualitas.
- 3) Ikut serta dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.²¹

²⁰ Sri Handini, Sukesi, Dan Hartati Kanti Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 13.

²¹ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 11.

b. Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai suatu kegiatan yang berproses, kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup kelompok sasaran dengan menjadikan mereka lebih sejahtera, berdaya atau mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan pada akhirnya menciptakan kemandirian masyarakat. Tentu saja, bukan hanya kemandirian pada aspek ekonomi, tetapi juga hak-hak sosial dan budaya, kebebasan berpendapat/bersuara, dan kemandirian masyarakat dalam menentukan hak politik.

Masyarakat dapat mengakui dan menggunakan hak politiknya sendiri untuk memilih calon pemimpin (tingkat daerah dan nasional), maupun calon anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Masyarakat tidak lagi takut ditekan oleh pihak tertentu, baik melalui janji-janji yang bersifat *lip service* atau sekedar retorika, maupun suap dalam bentuk apapun (uang, sandang, sembako dan sebagainya). Menjadikan masyarakat mandiri dalam memberikan hasil yang terbaik bagi mereka merupakan tujuan akhir dari program atau kegiatan pemberdayaan.

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama kelompok lemah yang tidak berdaya karena keadaan internal (berdasarkan persepsi mereka sendiri) atau keadaan eksternal (berdasarkan penindasan sosial yang tidak adil). Untuk lebih memahami tentang pemberdayaan, perlu diketahui perspektif kelompok rentan dan alasan ketidakberdayaan mereka.

Beberapa kelompok yang dapat digolongkan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, sebagai berikut:

- 1) Lemah secara struktural, yaitu lemah secara kelas (masyarakat yang kelas sosial ekonominya rendah), gender maupun etnis (kelompok minoritas), yang mendapatkan perlakuan kurang/ tidak adil dan diskriminasi.
- 2) Lemah secara khusus, yaitu mencakup kelompok manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay-lesbian, masyarakat terasing.

3) Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko, tujuan pemberdayaan mencakup beberapa upaya perbaikan seperti:²²

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*), berarti pemberdayaan harus dijadikan sebagai metode pendidikan yang positif. Untuk meningkatkan pendidikan pemberdayaan tidak cukup hanya sekedar memperbaiki materi, metode, waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa perluasan pendidikan non-formal dapat menumbuhkan semangat dan dorongan belajar yang tidak mengenal batasan usia dan waktu sebagai bagian dari proses pemberdayaan.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) artinya, seiring dengan terus berkembangnya pembelajaran seumur hidup, maka akan dimungkinkan untuk meningkatkan aksesibilitas, khususnya yang berkaitan dengan sumber informasi dan inovasi, sumber pendanaan, penyedia produk dan peralatan, dan organisasi pemasaran.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan Tindakan yang semakin membaik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*), mencakup peningkatan tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan harapan dapat memperkuat kelembagaan masyarakat, khususnya pembentukan jaringan kemitraan dunia usaha, sehingga mampu membentuk posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat di masyarakat.
- 5) Perbaikan usaha (*better business*), mencakup perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan,

²² Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 13.

yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan usaha atau bisnis yang dijalankan.

- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*) artinya, diharapkan perbaikan bisnis dapat meningkatkan pendapatannya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
 - 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*) artinya, karena kemiskinan dan rendahnya pendapatan sering kali menjadi akar penyebab kerusakan lingkungan, peningkatan pendapatan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan secara fisik dan sosial.
 - 8) Perbaikan kehidupan (*better living*) artinya, bahwa setiap keluarga dan masyarakat diharapkan dapat memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik berkat tingkat pendapatan yang cukup dan lingkungan yang sehat.
 - 9) Perbaikan masyarakat (*better community*) artinya, situasi kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, juga diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.
- c. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat
- Rukminto Adi, melihat beberapa organisasi masyarakat senantiasa mengikuti tahapan-tahapan berikut dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat:
- 1) Tahap persiapan. Terdapat dua kegiatan yang perlu dilakukan yaitu penyiapan petugas dan penentuan lokasi program.
 - 2) Tahap *assessment*. Kegiatannya mencakup penentuan permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*), dan sumber daya anggota masyarakat. Misalnya saja metode Focus Group Discussion (FGD) dan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang digunakan dalam *assessment*.
 - 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Tugas pengelola program pada titik ini adalah membantu masyarakat dalam membuat agenda dan program kerja yang harus dijalankan.

- 4) Tahap formulasi rencana aksi. Kegiatan utama fase ini adalah transformasi, yaitu pendampingan masyarakat atau kelompok dalam membuat proposal kegiatan untuk disampaikan kepada penyandang dana.
 - 5) Tahap pelaksanaan program. Dalam proses pemberdayaan masyarakat fase ini sangat penting karena hal ini memastikan bahwa rencana dilaksanakan secara efektif dan membantu mencegah terjadinya permasalahan yang dapat menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat maupun antara pengelola program dan masyarakat.
 - 6) Tahap evaluasi. Segala program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat harus melalui evaluasi. Menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan program merupakan tujuannya.
 - 7) Tahap terminasi. Fase ini menandai berakhirnya komunikasi resmi dengan komunitas yang dituju. Tahapan terminasi sering kali dilaksanakan karena masyarakat telah melampaui jangka waktu yang ditentukan, bukan karena dianggap mandiri.²³
- d. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Nilai-nilai normatif yang selama ini digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terbukti tidak efektif sehingga menyebabkan kegagalan dalam program pemberdayaan masyarakat. Akibat budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaannya, menyebabkan banyak program pemberdayaan masyarakat tidak efektif.

Nilai-nilai yang mendasari pemberdayaan masyarakat yakni:

1. Transparansi (Kejujuran), merupakan nilai yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab, kegiatan pemberdayaan masyarakat

²³ Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 11, https://www.academia.edu/5751363/Manajemen_Pengembangan_Masyarakat_Islam_PMI.

memerlukan integritas moral yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat. Setiap orang yang terlibat atau melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu menjunjung tinggi nilai kejujuran.

2. Keadilan, semua kelompok sasaran harus memiliki akses yang sama terhadap bantuan teknis dan peluang peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan.
3. Kepercayaan (*trust*), sangat penting dalam membangun pemahaman agar program berhasil. Pelaksana maupun kelompok sasaran yang akan diberdayakan harus saling percaya agar program dapat berjalan dengan baik.
4. Solidaritas dan saling tolong menolong, Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerja sama dan solidaritas seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang erat, kompleksitas permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama proses pemberdayaan masyarakat dapat diatasi dengan lebih mudah dan efektif.
5. Kepedulian, yaitu keinginan yang kuat dari anggota masyarakat lainnya untuk dengan sengaja berbagi satu sama lain. Nilai-nilai Islam mengharuskan kepedulian menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat, umat Islam sangat dianjurkan untuk peduli terhadap orang lain.
6. Berorientasi kepada masa depan. Masa depan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan masyarakat Islam. Artinya pengembangan masyarakat di masa depan memiliki nilai keberlanjutan.²⁴

Menurut Aswas, agar kegiatan pemberdayaan khususnya yang berbasis masyarakat dapat berfungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan, maka aparat/agen pemberdayaan

²⁴ Muhtadi dan Tantan Hermansah, Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), 19-21.

harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain:

- 1) Pemberdayaan dilaksanakan secara ikhlas, demokratis, dan tanpa paksaan.
- 2) Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran.
- 3) Mengingat masyarakat merupakan sasaran utama dalam pemberdayaan, maka masyarakat harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan tersebut dan menjadi landasan utama dalam menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk kegiatan pemberdayaan.
- 4) Menumbuhkan kembali nilai dan kearifan budaya lokal sebagai modal sosial dalam pembangunan seperti semangat gotong royong, menghormati orang yang lebih tua, dan yang tua menyayangi yang muda.
- 5) Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama secara turun temurun
- 6) Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi
- 7) Tidak ada diskriminasi, khususnya terhadap perempuan
- 8) Selalu terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lain
- 9) Mendorong keterlibatan Masyarakat dalam berbagai bentuk, baik non fisik (saran, waktu, dukungan) maupun fisik (materi, tenaga, bahan)
- 10) Aparat/agen pemberdayaan berperan sebagai fasilitator perlu memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi masyarakat. Kesiapan bekerja sama dengan organisasi

masyarakat/LSM dan seluruh pihak/lembaga terkait.²⁵

e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan yang mengandung nilai-nilai sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kemajuan terutama secara ekonomi. Konsep pemberdayaan masyarakat sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari tiga aspek, yaitu pengembangan, penguatan potensi, dan kemandirian. Pada konteks pengembangan, masyarakat yang belum berdaya dapat mengembangkan keterampilannya dengan menyesuaikan diri dengan budaya kehidupannya. Terkait dengan penguatan potensi, masyarakat diberikan motivasi dalam hal kecakapan hidup, sehingga menimbulkan sikap optimisme yang besar.

Pada saat yang sama, konteks kemandirian tidak hanya dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tak berdaya dalam jangka pendek, tetapi juga harus dalam jangka panjang. Setelah diberdayakan, masyarakat yang belum berdaya tidak hanya mendapatkan kekuasaan, tetapi juga perlu memastikan bahwa mereka mampu untuk mandiri dengan mengembangkan kekuatan atau daya yang dimilikinya.

Konsep pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan ajaran Islam. Islam menanamkan dalam diri setiap manusia nilai saling menghormati satu sama lain di samping ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini menandakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran Islam diwujudkan dalam pemberdayaan masyarakat. Perubahan ke arah yang lebih baik dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Dalam QS. Ar-Ra'd [13]:11 menjelaskan konsep Islam tentang perubahan:

²⁵ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 17-19.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dalam Islam, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, terutama dalam bidang ekonomi. Kesuksesan ini menjadi impian dan harapan bagi seluruh individu yang hidup di dunia. Tidak ada satu pun yang tidak menginginkan kehidupan yang sejahtera. Setiap tindakan yang tidak mendukung kesejahteraan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam adalah agama yang menginginkan umatnya hidup sejahtera, karena itu adalah awal dari kemashlahatan.²⁶

Menurut perspektif Islam berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dilakukan untuk mencapai kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah) dan kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). Membangun dan menumbuhkan kewirausahaan di keluarga yang kurang memiliki daya/otoritas adalah awal yang baik dalam hal pemberdayaan masyarakat. Sehingga usaha mandiri di bidang ekonomi dalam keluarga tersebut dapat diciptakan. Islam sangat menekankan pemberdayaan masyarakat karena dengan cara itulah umat Islam

²⁶ Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam,” *Syar'ie* 3 (2020): 1–17, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

menerapkan prinsip-prinsip kepedulian yang terdapat dalam Islam. Melalui pemberdayaan masyarakat, dapat tercapai suatu peradaban yang berkelanjutan secara ekonomi.

4. Pengembangan Desa Wisata dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengembangan Desa Wisata dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata memegang peran yang signifikan, karena sumber daya, adat istiadat, dan tradisi yang terkait dengan masyarakat tersebut menjadi faktor utama dalam memacu pertumbuhan desa wisata. Namun, komunitas lokal yang hidup berdampingan dan berkembang bersama tempat-tempat wisata merupakan aspek integral dari ekosistem. Oleh karena itu, tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat sangat bergantung bagi keberhasilan pengembangan desa wisata.

Dukungan masyarakat sekitar atau disebut juga *Community Based Tourism* merupakan hasil pengembangan masyarakat yang mendistribusikan manfaat yang tidak terdapat pada seluruh masyarakat. Manfaat ini mencakup keuntungan finansial serta memberikan masyarakat lokal keterampilan dan sumber daya untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

Dalam model pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, peran masyarakat sangat penting. “Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, artinya pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang serta layak secara ekonomi, layak secara moral dan sosial bagi masyarakat.” Adapun Adiyoso menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang paling krusial dalam upaya menjamin kemandirian dan keberdayaan.²⁷

²⁷ Budhi Pamungkas Gautama et al., “Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat,” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2020): 361, <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>.

Suansri mengidentifikasi beberapa prinsip yang harus diikuti dalam pelaksanaan *Community Based Tourism*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a) Mendorong dan mendukung kepemilikan masyarakat di sektor pariwisata
- b) Melibatkan penduduk setempat dalam proses perencanaan untuk semua aspek.
- c) Menumbuhkan rasa bangga masyarakat
- d) Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- e) Menjamin kelestarian lingkungan hidup.
- f) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal.
- g) Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas.
- h) Menghormati harkat dan martabat manusia dan keanekaragaman budaya.
- i) Mendistribusikan keuntungan secara adil ke seluruh masyarakat.
- j) Berkontribusi dalam perhitungan persentase pendapatan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari pengelolaan desa wisata merupakan dua tujuan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu, strategi perencanaan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat pada hakikatnya mengikuti tiga prinsip utama, yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Dalam pengambilan keputusan melibatkan masyarakat
- 2) Terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat
- 3) Pemberian edukasi kepada masyarakat lokal tentang pariwisata

²⁸ Riant Nugroho Dan Firre An Suprpto, *Membangun Desa Wisata Bagian 3: Pengelolaan Desa Wisata* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2021), 40.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata

Wearing menyatakan bahwa tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat setempat sangat menentukan perkembangan desa wisata. Masyarakat berperan sebagai tuan rumah dan pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses pengembangan desa wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pengawasan. Susilo, dkk menjabarkan tipe masyarakat desa atas 3 (tiga) bagian besar yaitu: ²⁹

1) Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih sangat memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang, yang kadangkala pelaksanaannya di luar akal sehat. Adapun ciri-ciri masyarakat tradisional antara lain memiliki gaya hidup yang fleksibel atau inovatif, konservatif terhadap kebijakan baru, tingkat pendidikan yang masih rendah, menolak inovasi, masih percaya dengan kepercayaan tertentu atau kekuatan spiritual di luar akal sehat atau tidak rasional dan sebagainya.

2) Masyarakat Transisi

Masyarakat transisi adalah masyarakat yang sudah mulai mau menerima perubahan, akan tetapi belum sepenuhnya melaksanakan perubahan atau inovasi. Ciri-ciri dari masyarakat transisi adalah terbuka terhadap perubahan, mau menerima informasi baru, mulai adaptif terhadap sesuatu yang baru, percaya kepada pemerintah dan masyarakat lain dan sebagainya.

3) Masyarakat Modern

Masyarakat modern adalah masyarakat yang lebih maju, mudah menerima ide-ide baru, dan siap menerima serta menerapkan perubahan positif. Adapun ciri-ciri masyarakat modern adalah memiliki pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik, inovatif

²⁹ Erika Revida, dkk., Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi, Dan Dampak Kunjungan Wisata, 10.

dan kreatif, dan memandang masa depan lebih positif, memiliki wawasan yang lebih luas serta memiliki pengetahuan teknologi yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi kewajiban masyarakat, namun kini sudah menjadi hak masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat Sanof dan Adiyoso bahwa setiap masyarakat mempunyai hak baik secara langsung atau tidak langsung untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengembangan, termasuk dalam mengembangkan desa wisata.

Menurut Timothy dalam mengkaji partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdapat dua perspektif. Kedua sudut pandang ini membahas dua permasalahan: (1) partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan; dan (2) manfaat pertumbuhan pariwisata bagi masyarakat lokal. Timothy menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal dan kebutuhan pembangunan serta kapasitas mereka untuk memperoleh manfaat dari pariwisata. Sesungguhnya, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata mengandung makna yang luas, bukan saja ketika dalam tahap implementasi, akan tetapi mulai dari tahapan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengembangan desa wisata.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian yang telah selesai dan mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan disebut penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian mengenai strategi pengembangan desa wisata dalam pemberdayaan masyarakat bukanlah satu-satunya penelitian yang dilakukan sebelumnya. Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Strategi

³⁰ Erika Revida, dkk., *Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi, Dan Dampak Kunjungan Wisata*, 12.

Pengembangan Desa Wisata Pancasila Di Desa Jrahi Kabupaten Pati dalam Pemberdayaan Masyarakat, untuk mengetahui perbedaan dan pembaruan penelitian peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya berdasarkan berbagai pandangan dari beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian ditulis oleh Lediana Apriyani, dalam Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 dengan judul "*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan*". Penelitian ini bertujuan adalah untuk menentukan proses pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi lokal yang dilakukan oleh komunitas Janis di Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Komunitas Janis merupakan sebuah kelompok sosial yang memberikan inovasi-inovasi sederhana dan tepat guna bagi kelompok sasarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan dalam bentuk tulisan/kata beberapa temuan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah desa, masyarakat desa, dan pengurus komunitas Janis yang berjumlah sembilan orang yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal: (1) *Penyadaran*, yang menitikberatkan pemberian informasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. (2) *Pengkapasitasan*, yaitu proses pemberian kapasitas kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan kompeten dengan memberikan pelatihan mengenai pelatihan pengelolaan website, *entrepreneur*, dan manajemen pengelolaan pariwisata, dan sebagainya. (3) *Pendayaan*, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola semua kegiatan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi lokal memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi

alam dan pariwisata yang dimiliki, sehingga mengarah pada peningkatan pembangunan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.³¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada rumusan masalah, tujuan, dan temuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah mengidentifikasi Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi yang terletak di Kabupaten Pati dengan penekanan khusus pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini secara khusus berlokasi di Desa Jrahi yang terletak di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Sebaliknya, penelitian sebelumnya berpusat pada proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang dilakukan oleh masyarakat Janis, dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kunjir, Rajabasa, Lampung Selatan. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Agustin, dalam Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Institui Agama Islam Negeri Purwokerto 2020 dengan judul “*Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serang Kecamatan Karangrejo Kabupaten Purbalingga*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan model dan strategi yang digunakan dalam pengembangan desa wisata di Desa Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan narasumber pengelola desa wisata Serang, Pengelola BUMDes, dan tokoh masyarakat desa wisata Serang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Serang menggunakan berbagai strategi dalam

³¹ Lediana Apriyani, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

pengembangan pariwisata, seperti mengembangkan atraksi wisata, mempromosikan Desa Wisata Serang, menyediakan akomodasi, menganalisis program kelembagaan, dan menyediakan fasilitas umum. Selain itu, terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Serang: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan oleh BUMDes melalui sosialisasi dan inovasi hingga akhirnya Desa Serang disetujui sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dibangun melalui pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Disnaker dan Disporapar mengenai pelatihan manajemen pengelolaan kepariwisataan dan keterampilan. Selain itu, pendayaan dilakukan dengan memberikan modal kepada Desa Serang untuk memperkuat daya tariknya bagi wisatawan.³²

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat pada rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada Desa Serang, Karangrejo, Purbalingga, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada identifikasi Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi Kabupaten Pati dalam Pemberdayaan Masyarakat. Sementara itu, yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat pada metodologi penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif.

3. Penelitian yang ditulis oleh Tyas Arma Rindi, dalam Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2019 dengan judul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (studi kasus Desa Wonokarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*". Penelitian ini bertujuan untuk memahami potensi pemberdayaan masyarakat dan langkah-langkah dalam mengembangkan potensi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitiannya dengan mengumpulkan data melalui

³² Ika Agustin, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serang Kecamatan Karangrejo Kabupaten Purbalingga" (SKRIPSI, IAIN Purwokerto, 2020), <https://doi.org/10.33005/Jdep.V4I1.198>.

wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada potensi yang ada di desa wisata seperti *grass track*, kerajinan bambu, dan embung tirtayasa. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kepala desa, ketua PODARWIS Desa Wonokarto, ketua *grass track*, paguyuban guyub rukun dan masyarakat setempat untuk dijadikan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata dapat meningkatkan peluang penghasilan bagi masyarakat, dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas di daerah tersebut karena banyaknya kerasi unik dan ide-ide menarik sehingga dapat melatih anak muda membuat kreasi terbaru dan membuka usaha sendiri. Keberadaan desa wisata ini dapat memberdayakan masyarakat Desa Wonokarto.³³

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi Kabupaten Pati dalam pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Wonokarto, Sekampung, Lampung Timur. Meskipun demikian, walau lokasi penelitiannya berbeda, perlu diketahui bahwa kedua penelitian tersebut memiliki metodologi penelitian yang serupa, karena keduanya menggunakan metode kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dinar Wahyuni, dalam jurnal *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, dengan judul “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul*”. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun pariwisata saat ini berkembang dengan pesat, namun pertumbuhan destinasi pariwisata tidak menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

³³ Tyas Arma Rindi, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)” (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul. Dalam studi ini, Dinar Wahyuni menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran melalui tiga strategi utama: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Proses penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi hingga akhirnya Desa Nglanggeran ditetapkan sebagai desa wisata. Upaya pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan tentang manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah organisasi yang disebut Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Tahap pendayaan diberikan pada masyarakat yang sudah memiliki kapasitas sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran telah menerima banyak dukungan dari berbagai sumber untuk pembangunan sarana pendukung pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata. Strategi pemberdayaan masyarakat telah berhasil mengembangkan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunung Kidul melalui retribusi tiket.³⁴

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subyek dan objek penelitian. Artikel jurnal Dinar Wahyuni fokus pada Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Sebaliknya penelitian skripsi ini fokus pada Strategi Pengembangan Desa Wisata Pancasila di Desa Jrahi Kabupaten Pati dalam Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Jrahi Kabupaten Pati, berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya yaitu Desa Wisata Nglanggeran Gunung Kidul. Selain itu, tujuan kedua penelitian tersebut juga berbeda. Di sisi lain, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan karena menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengkaji strategi pengembangan desa wisata dalam pemberdayaan masyarakat.

³⁴ Wahyuni, "Strategi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul.", 83-100.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rizza Age Winanta, Sholihul Hakim, Anisa Setya Arifina, dan Annisa Nurul, dalam jurnal JPALG, dengan judul “*Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi pengembangan desa wisata Ngawen melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata merupakan salah satu cara untuk mendongkrak pendapatan dana desa. Hal ini juga diharapkan dapat membantu pertumbuhan masyarakat dengan mendorong pengembangan keterampilan individu dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. FGD (*Focus Group Discussion*), wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa wisata Ngawen memiliki potensi besar untuk pariwisata, dan sebagian besar penduduk setempat bersedia berkontribusi dalam pengembangan desa wisata karena berbasis masyarakat. Meski demikian, terdapat sejumlah faktor lain yang berpotensi menghambat pengembangan Desa Wisata Ngawen.³⁵

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada subjek dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya fokus pada Strategi Pengembangan Desa Wisata melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang), sementara penelitian ini difokuskan pada Strategi Pembangunan Desa Wisata Pancasila Di Desa Jrahi, Kabupaten Pati, dalam Pemberdayaan Masyarakat. Lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Ngawen,

³⁵ R. A Winanta et al., “Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang),” *JPALG* 6, no. 1 (2022): 17–24, <https://doi.org/10.31002/jpalg.v6i1.5651>.

Muntilan, Magelang, sedangkan penelitian ini menggunakan Desa Jrahi Kabupaten Pati sebagai lokasi penelitian. Meskipun demikian, kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang strategi pengembangan desa wisata dalam pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

C. Kerangka Berfikir

Pariwisata merupakan komoditas yang dapat mencakup semua unsur yang ikut berperan aktif dalam pengembangan pariwisata sehingga bisa mendukung pemasukan asli wilayah. Keberhasilan suatu desa wisata dibuktikan dengan sejauh mana kegiatan wisata tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, seperti meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana Desa Jrahi, Kecamatan Gunungungkal, Kabupaten Pati.

Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata atau desa wisata harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan kehidupan masyarakat setempat secara langsung dan partisipasi masyarakat. Agar suatu desa wisata dapat berkembang dan menjadi potensi desa yang maju maka diperlukan adanya strategi pengembangan desa wisata. Keberhasilan suatu desa wisata tidak hanya bergantung pada strategi pengembangan yang diterapkan, namun juga dari tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat setempat. Masyarakat lokal merupakan faktor terpenting dalam pengembangan sebuah desa wisata, karena mereka adalah pelaku pariwisata yang melakukan kegiatan wisata berupa penyediaan jasa dan pelayanan pariwisata.

Selain itu, ada beberapa faktor, baik yang mendorong maupun yang menghambat pengembangan desa wisata, yang berdampak pada pengelolaan desa wisata. Partisipasi masyarakat lokal merupakan faktor pendukung, namun pemahaman masyarakat lokal itu sendiri menjadi faktor penghambat. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi pengembangan Desa Wisata Pancasila dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Jrahi. Dengan adanya pengembangan desa wisata ini, diharapkan masyarakat Desa Jrahi dapat menjadi mandiri dan sejahtera.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

